

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, dalam menjalani hidupnya manusia membutuhkan beberapa hal pokok untuk menunjang pertumbuhannya. Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi adalah pangan atau makanan yang berfungsi sebagai sumber energi untuk membantu mereka terus aktif dalam melaksanakan tugasnya di bumi ini. Selain itu, pangan merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut, manusia membutuhkan asupan makanan bergizi yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, zat besi, dan kandungan-kandungan lainnya. Pemenuhan gizi tersebut dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan organik atau anorganik. Akan tetapi, pemenuhan gizi khusus bagi umat muslim terdapat beberapa syarat yaitu harus sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan dalam Al-qur'an surat Al-Baqoroh ayat 168 dan 172, surat Al-Maidah ayat 88 serta surat An-Nahl ayat ke 114 dan 116, bahwa makanan yang akan dikonsumsi hendaklah makanan halal.

Makanan halal telah tertuang dalam firman-Nya membuktikan bahwa tidak semua hal dapat dikonsumsi khususnya bagi umat muslim yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, umat muslim harus lebih berhati-hati dalam

---

<sup>1</sup>PenjelasanUndang-UndangNomor 18 Tahun 2012 TentangPangan.

memilih makanan yang akan dikonsumsi. Kecuali yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-baqoroh ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Ayat tersebut mengandung arti bahwa Allah hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah atau selain Allah. Akan tetapi Allah membolehkan umat Islam untuk mengonsumsi apa yang Ia haramkan jika dalam keadaan terpaksa.

Seiring berkembangnya zaman, semakin besar pula pertumbuhan manusia, jika pada masa lampau manusia mengonsumsi makanan berasal dari alam seperti kebun, sawah, hasil hutan, dan lain-lain. Saat ini orang banyak menyantap makanan instan yang diolah dengan berbagai teknologi dengan kualitas dan memiliki varian rasa yang didapat dari bahan penolong atau bahan tambahan.

Pembuatan bahan penolong produk olahan juga mempunyai kesulitan dalam mendeteksi kandungannya. Terkadang bahan baku yang digunakan halal, akan tetapi proses pengolahan makanan dibantu dengan bahan bersifat syubhat<sup>2</sup>. Informasi tentang proses tersebut tidak bisa disampaikan melalui

---

<sup>2</sup> Istilah dalam islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman sesuatu.

kemasan, dan terkadang ada unsur kesengajaan menyembunyikannya<sup>3</sup>, sebagaimana kasus yang telah terjadi pada tahun 1988 tentang dendeng sapi bercampur babi.<sup>4</sup>

Berdasarkan kasus serupa yang ada, masyarakat mulai sadar akan pentingnya makanan halal. Pada tanggal 6 Januari 1989 M Majelis Ulama Indonesia memberi fasilitas kepada masyarakat dengan cara membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan kosmetik yang disingkat menjadi LPPOM.<sup>5</sup> Tugas utama LPPOM yaitu melakukan pemeriksaan dan pembuatan sertifikasi halal. Hal tersebut membuat masyarakat tentram dan merasa aman.

Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar Negara (UUD) 1945 menjelaskan bahwa rasa tentram dan aman terhadap pangan yang akan dikonsumsi merupakan hak warga negara. Jika perusahaan telah memenuhi syarat maka secara otomatis LPPOM MUI akan menerbitkan sertifikasi halal, yang kemudian menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada kemasan makanan.<sup>6</sup>

Menjamin ketentraman masyarakat muslim juga salah satu tugas dari MUI sebagaimana disebutkan dalam Wawasan Majelis Ulama Indonesia dan Pedoman Dasar MUI (Pasal 4) yaitu pemberi fatwa kepada umat islam dan pemerintah baik diminta maupun tidak diminta. Meskipun pada hakikatnya

---

<sup>3</sup>Zumar Aminuddin. 2016. *Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Thailand*. Vol. I No. I. LP2M IAIN Surakarta. Hal. 28.

<sup>4</sup>Hasan Sofyan. 2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Hal 3-4.

<sup>5</sup>*Sejarah Lppom Mui*. [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org) Diakses Pada 16 September 2017.

<sup>6</sup>Farkhan Ali Tsani. 2014. *Urgensi Jaminan Produk Halal Di Indonesia* [Http: //Www. Mirajnews. Com](http://www.mirajnews.com). Diakses Pada 16 September 2017.

fatwa ulama itu tidak mengikat sebagaimana keputusan Pengadilan Agama dan Undang-Undang.<sup>7</sup>

Pada tahun 2014, pemerintah bekerja sama dengan anggota DPR untuk mengesahkan Undang-Undang nomor 33 tentang jaminan produk halal<sup>8</sup> dengan tujuan perlindungan hukum dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat untuk mengonsumsi dan menggunakan produk.<sup>9</sup> Undang-Undang tersebut merupakan tindak lanjut dari fatwa MUI yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat halal produk makanan, agar memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat seperti keputusan pengadilan agama dan Undang-Undang lainnya.

Berdasarkan data LPPOM MUI bahwa rumah makan di Kota Malang yang telah memiliki sertifikat halal tidak mencakup sepuluh rumah makan. Selain rumah makan, terdapat beberapa toko roti dan outlet franchise menjadi pusat perhatian konsumen tetapi belum tersertifikasi halal seperti Waroeng Super sambal (SS)<sup>10</sup> dan Ayam Goreng Nelongso.

Selain itu terdapat outlet donat yang banyak digemari oleh mahasiswa yaitu J.Co Donuts yang telah memiliki lebih dari 200 toko di seluruh Indonesia dan memiliki tiga outlet di Kota Malang.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan

---

<sup>7</sup>Panji Adam. 2017. *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*. Vol. I No. I. Fakultas Syariah UNISBA. Hal. 163.

<sup>8</sup>Selanjutnya disebut dengan UU JPH

<sup>9</sup>Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pasal 3 huruf a.

<sup>10</sup>Data Print Out LPPOM MUI Surabaya.

<sup>11</sup>Machan.2017. *Lagi, J. Co Donuts & Coffe Buka Toko di Malang*.<https://Malangchannel.com> rilis pada 3 Oktober 2017. diakses pada 30 Maret 2018.

tingginya jumlah peminat restoran dan toko yang masih syubhat karena belum memiliki sertifikat halal dari MUI.

Peminat restoran dan toko roti tersebut banyak diminati oleh konsumen dari berbagai profesi seperti ibu rumah tangga, pegawai pemerintah, pelajar dan mahasiswa. fakta tersebut bertolak belakang dengan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia mayoritas muslim, semestinya menghindari produk-produk bersifat syubhat. Ajaran islam melarang umat muslim untuk mengonsumsi makanan syubhat sebagaimana tercantum dalam hadist Rosulullah SAW. Pada hadits arba'in Imam An-Nawawi nomor 6 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim.

Mahasiswa memiliki peran penting dalam peningkatan perokonomian di Kota Malang yang biasa disebut dengan kota wisata, dengan keanekaragaman wisatanya, Kota Malang menyediakan pula berbagai makanan yang menjadi oleh oleh khas malang sebagaimana yang disebutkan di atas. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang **“Kesadaran Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Terhadap Hak Perlindungan Konsumen atas Makanan Halal Berkaitan dengan Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 2 Huruf a Tentang Jaminan Produk Halal”**.

## **B. RUMUSAN PERMASALAHAN**

1. Bagaimana kesadaran Mahasiswa Universitas Muhamamdiyah Malang (UMM) terhadap Hak Perlindungan Konsumen atas Makanan Halal Berkaitan dengan Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 2 Huruf a tentang Jaminan Produk Halal?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam terbentuknya kesadaran mahasiswa UMM terhadap hak perlindungan konsumen atas makanan halal sesuai dengan Pasal 2 huruf a undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kesadaran Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terhadap hak perlindungan konsumen berkaitan dengan efektivitas Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 Pasal 2 huruf a tentang jaminan produk halal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor pendukung dan penghambat mengenai kesadaran mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terhadap hak perlindungan konsumen atas makanan halal sesuai dengan Pasal 2 huruf a Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial, khususnya dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan mengenai penerapan halal dan haramnya makanan, selain itu meningkatkan kajian ilmu dalam bidang Hukum Positif yaitu Hukum Pangan, Hukum Konsumen juga sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi penulis**

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Islam dan Hukum Positif. Serta sebagai tambahan wawasan mengenai Kesadaran Masyarakat tentang Hak Perlindungan Konsumen atas Makanan Halal.

#### **b. Bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dan menambah wawasan tentang kesadaran bahwa pemerintah telah memberikan keamanan berupa perlindungan makanan untuk konsumen muslim dengan mewajibkan pelaku usaha untuk mensertifikasikan usaha mereka.

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa. Dari hasil penelitian-penelitian itu dapat dilakukann generalisasi yang lebih komprehensif.

**c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru kepada masyarakat akan pentingnya Kesadaran Masyarakat tentang Hak Perlindungan Konsumen atas Makanan Halal, yang dengan hal tersebut menjadikan bentuk evaluasi diri bagi seluruh Keluarga Muslim di seluruh dunia dalam melaksanakan ibadah secara benar.

**E. METODE PENULISAN**

**1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan/yuridis sosiologis (*Field Research/Socio Legal Research*), yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum yang lainnya yang merupakan data, selain itu juga untuk melihat penerapannya atau pelaksanaannya dalam masyarakat melalui penelitian lapangan dan juga bisa dilakukan dengan meninjau,melihat,



serta menganalisis masalah dengan menggunakan pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.<sup>12</sup>

Dalam hal ini penulis menerapkan penelitian lapangan/yuridis sosiologis tersebut dengan pengumpulan dan peninjauan data secara langsung pada Mahasiswa UMM yang nantinya akan di berikan kuesioner melalui media masa. Dari tanggapan kuesioner tersebut akan dianalisis dan disesuaikan dengan norma hukum yang ada.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Mahasiswa UMM. Peneliti memilih dari berbagai jurusan guna mendapatkan hasil penelitian yang bervariasi. Selain itu, UMM merupakan salah-satu Universitas yang memiliki program mata kuliah tentang Agama Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dimulai sejak semester satu hingga semester enam.

Peneliti menjadikan Mahasiswa UMM sebagai objek penelitian karena mahasiswa merupakan salah satu generasi penerus bangsa, yang dapat memberikan dan menyebarkan nilai-nilai positif kepada masyarakat luas. Dalam penelitian ini, tidak semua mahasiswa UMM menjadi objek penelitian, akan tetapi hanya mahasiswa semester VI dan lanjut yang beragama islam dari berbagai jurusan dengan kategori mengonsumsi makanan tradisional, makanan western, makanan cepat saji (*junkfood*) dan makanan kaki lima sebagai objek penelitian.

---

<sup>12</sup>Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 12.

### 3. Jenis data

#### a) Data Primer

Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari Lokasi Penelitian.<sup>13</sup> Di antaranya adalah:

- a. Hasil tanggapan kuesioner informan.
- b. Hasil wawancara dengan informan.
- c. Dokumen-dokumen dan/ atau data-data yang peneliti peroleh secara langsung di lapangan dari Mahasiswa UMM yang berhubungan dengan penelitian kesadaran masyarakat tentang hak perlindungan konsumen atas makanan halal.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan undang-undang, buku-buku literatur maupun hasil penelitian terdahulu sebagai acuan tambahan penulis.<sup>14</sup> Sumber data yang terkait antara lain :

- a) Al-Qur an
- b) Hadits atau As-Sunnah
- c) Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- e) Undang Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>13</sup>Pedoman penulisan hukum. 2012. Malang: Fakultas Hukum UMM. Hal. 18

<sup>14</sup>Pedoman penulisan hukum... Hal 18.

### **c) Data Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari:

1. Jurnal,
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
3. Studi Pustaka,
4. Studi internet.

### **4. Penentuan Informan**

Informan adalah subjek yang diwawancarai dan merupakan bagian dari sampel. Syarat Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
- b. Beragama Islam
- c. Mahasiswa semester 6 atau lanjut.

Tiga poin tersebut menjadi kriteria karena mahasiswa semester 6 atau lanjut telah memiliki dasar dan ilmu yang cukup untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui mata kuliah Agama Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang telah mereka tempuh sejak semester 1 hingga semester 6.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Angket atau Kuesioner**

Kuesioner merupakan alat riset atau survey yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis dan terstruktur, bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos.<sup>15</sup>

Pembuatan instrumen kuesioner dikaitkan dengan landasan teori dalam menganalisis. Instrumen Kuesioner yang telah tersusun rapi dari beberapa pertanyaan tersebut akan dipublikasikan oleh peneliti melalui media sosial seperti Whatsapp atau Line kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria di atas.

#### **b. Interview atau Wawancara**

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai.<sup>16</sup> Wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan cara *purposive sampling* dari populasi yang ada<sup>17</sup> atau berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subyek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/kuesioner> diakses pada 2 maret 2018

<sup>16</sup>Burhan Bungin. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metoologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. Hal 155.

<sup>17</sup>Pedoman penlusian hukum. 2012. Malang: Fakultas Hukum UMM. Hal.18

<sup>18</sup>Haris Hardiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. Hal 106

Dalam hal ini, penulis menentukan sendiri sampel yang akan diambil dari beberapa mahasiswa yang telah mengisi kuesioner yang dianggap tidak adanya sinkronisasi dari jawaban kuesioner yang telah diisi, dari beberapa mahasiswa yang mendapatkan informasi mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal dari media massa, komunitas dan sosialisasi dari pemerintah, selain itu peneliti juga akan melakukan wawancara kepada mahasiswa yang belum mengetahui adanya undang-undang jaminan produk halal.

**c. Observasi**

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian yang diamati oleh peneliti. Dalam artian bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti pada saat wawancara. Yang mana wawancara ini dilakukan sebagai tindak lanjut setelah responden mengisi kuesioner.<sup>19</sup>

Pengamatan dilakukan dengan cara melihat secara langsung dari bahasa tubuh atau mimik wajah responden, dan melihat dari kegiatan sehari-hari dari beberapa responden. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden mengisi kuesioner secara benar atau hanya sebagai bentuk dari pencitraan diri saja sehingga peneliti mendapatkan hasil penelitian secara konkret.

---

<sup>19</sup>Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: pustaka setia. Hal. 32.

#### **d. Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka peneliti akan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

#### **e. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.<sup>21</sup> Dalam hal ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data berkaitan dengan kesadaran keluarga muslim terhadap perlindungan makanan halal dari pemerintah.

#### **f. Studi Website**

Studi website adalah metode pengumpulan data dari website atau halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi

---

<sup>20</sup>Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: pustaka setia. Hal. 31.

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto dalam skripsi Melia Fitri. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta : Rineka Cipta. Hal. 206

dengan jaringan internet. Dalam hal ini peneliti mendapatkan beberapa data dari website resmi milik LPPOM MUI.

## **F. ANALISA DATA**

Analisa data adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara meneliti data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa data yaitu analisa data deskriptif kualitatif, yaitu memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk predikat yang sebanding dengan atau atas dasar kondisi yang diinginkan.<sup>23</sup>

Melalui analisa data deskriptif kualitatif ini penulis akan menggambarkan hasil pengumpulan dan peninjauan data yang didapat dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan mengenai Kesadaran Masyarakat tentang Hak Perlindungan Konsumen atas Makanan Halal.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian ini terdiri dari empat bab dimana setiap bab terdapat pembahasan dari penelitian ini. Sistematika penulisannya sebagai berikut :

---

<sup>22</sup>Lexy J Moleong dalam Skripsi Melia Fitri. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya. Hal 248.

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto dalam Skripsi Melia Fitri, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, 1990, Jakarta, hlm 353

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penlitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan beberapa landasan teori yang digunakan dan menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun skripsi, antara lain: Tinjauan teori prinsip halal dan haram, membahas mengenai kategori produk makanan halal dan haram serta hikmah pelarangan haram oleh agama islam. selanjutnya membahas mengenai teori sertifikasi halal mui, pengertian, dasar hukum dan korelasi sertifikasi halal dengan perlindungan konsumen. Kemudian tentang teori kesadaran hukum berupa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan terhadap hukum, penghargaan terhadap hukum, peningkatan kesadaran hukum. Selanjutnya tentang teori efektivitas hukum dengan sub-bab kaidah hukum (undang-undang), petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, serta kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir mengenai teori perlindungan konsumen, berupa asas-asas perlindungan konsumen, hak-hak konsumen dalam perspektif UUPK, hak-hak konsumen dalam perspektif hukum islam.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil data penelitian yang penulit teliti, dan juga penulis akan menganalisis hasil data tersebyt sesuai



dengan pemaparan yang tertuang dalam rumusan masalah, serta penulis akan memberikan ide hukum mengenai judul penelitian ini.

#### **BAB IV    PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian penulis, serta saran dan rekomendasi penulis sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

